

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN.

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, permohonan perizinan pelayanan jasa medik veteriner diajukan kepada Bupati melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara daring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsidan Kabupaten/Kota;
- 11. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- 14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 80 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
- 18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 18 September 2020

> > BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN
ATASPERATURAN BUPATI NOMOR 38
TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1.	 a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Lokasi c. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan d. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (non kecil dan kecil) e. Izin Membuka Tanah 	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	 a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata b. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan atau Karaoke c. Izin Membawa Cagar Budaya keluar daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi 	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	 a. Izin Usaha Perdagangan b. Nomor Induk Berusaha c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan d. Izin Usaha Toko Swalayan e. Tanda Daftar Gudang (TDG) f. Izin Usaha Industri g. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	a. Izin Penyelenggaraan Optikal b. Izin Operasional Laboratorium Klinik c. Izin Penyelenggaraan Apotek d. Izin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D) e. Izin Operasional Rumah Sakit (Tipe C dan D) f. Izin Operasional Klinik g. Izin Toko Obat h. Izin Pengobatan Tradisional i. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) j. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah k. Izin Toko Alat Kesehatan l. Izin Operasional Puskemas m. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga n. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa	DINAS KESEHATAN
5.	a. Izin Lingkungan b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 c. Izin Pengumpulan Limbah B3 dalam daerah kabupaten d. Izin Pemanfaatan Are' Lancor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	 a. Izin Usaha Rumah Potong Hewan b. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan c. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan d. Izin Usaha Peternakan e. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan f. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan 	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

	 g. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner: 1) Izin Paraktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis 2) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi 3) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator 4) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 5) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan 	
7.	a. Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan dalam daerah kabupaten b. Tanda Daftar Kabal Perikanan untuk nelayan kecil	DINAS PERIKANAN
8.	 a. Perizinan dan pendaftran lembaga pelatih kerja b. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta dalam daerah kabupaten 	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9.	 a. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat c. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal 	DINAS PENDIDIKAN
10.	Izin Trayek	DINAS PERHUBUNGAN
11.	Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial	DINSOS
12.	a. Izin Koperasi Simpan Pinjam dengan wilyah keanggotaan dalam wilayah kabupaten	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	b. Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten	
	 c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten d. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah keanggotaan dalam wilayah kebupaten 	
13.	Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah	DINAS TANAMAN PANGAN,
	kabupaten	HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
14.	Izin Reklame	BADAN KEUANGAN DAERAH
15.	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI PAMEKASAN,

BADRUT TAMAM